

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.584/PID.B/2013/PN.DPK)

Mutia

Abstrak

Tindak pidana yang paling sering terjadi dan berkembang dalam masyarakat yang terkait dengan uang adalah tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan penyertaan tindak pidana, dan upaya penegakan hukum memberantas penipuan dan pencucian uang secara bersama-sama yaitu dengan mengoptimalkan penegakan hukum dengan cara sosialisasi perundang-undangan serta Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar penegak hokum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

**CRIMES FRAUD AND MONEY LAUNDERING CONDUCTED
IN TOGETHER (CASE STUDY DECISIONS
NO.584/Pid.B/2013/PN.DPK)**

Mutia

Abstract

Crimes which occurred most frequently were and develops in the community related to money are crimes fraud and crimes money laundering. This research raised problems of accountability criminal the crimes fraud and money laundering conducted in together and law enforcement efforts to combat crime fraud and money laundering conducted in together. To answer problems the use writers the theory accountability and criminal law enforcement theory. This research in a research juridical normative is by examining the legislation in accordance with formulation problems. Conclusion of this research is accountability criminal the crimes fraud and money laundering conducted in together set in article 378 KUHP about crimes fraud, Article 3 of the act no. 8 / 2010 on prevention and eradication of criminal acts of money laundering, And article 55 paragraph (1) KUHP is participation crimes, and law enforcement eradicate fraud and money laundering together namely to optimize law enforcement by means of socialization legislation and improve coordination and synergy between law enforcement.

Keywords: Crimes , Crime Fraud , Crime Money Laundering.